



RENCANA KERJA BAPENDA KAB. BONE TAHUN 2020



**JENIS
LAYANAN**

DATA BARU

PAJAK NAMA

PERALIHAN

PENGABUNGAN

PERUBAHAN

PENGURANGAN

PENYUSUNAN

PELAYANAN

**PAJAK BUMI & BANGUNAN
PEDESAAN PERKOTAAN**

**STOP
PUNGLI**



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2020**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan rencana kerja perangkat daerah yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, maka perlu disusun dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah
- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 2020 mulai dari tahap persiapan hingga ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone 2020;
 - b. mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan menyusun rancangan awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 dan rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 dan Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 2020;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 2019

KEPALA BAPENDA KAB. BONE

A. HERMAN, SH. MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Bupati Bone di Watampone
2. Kepala Bappeda Bone di Watampone
3. Pertinggal

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2020

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2020**

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Pembina | : | Kepala Badan Pendapatan Daerah |
| 2. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Bapenda |
| 3. Ketua Tim | : | Kabid. Perencanaan & Pengendalian Operasional (P2O) |
| 4. Wakil Ketua | : | Kasubag. Program |
| 5. Sekretaris | : | Kasubag. Umum dan Kepegawaian |
| 6. Anggota Tim | : | 1. Andi Yuliana Bachtiar, S.Sos
2. A. Febrianti, SH |

KEPALA BAPENDA KAB. BONE

A. HERMAN, SH. MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19620724 199003 1 008

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). Renja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahun 2019 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 beserta Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.

Dengan adanya tuntutan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari aspek perencanaan strategis, maka harus dilakukan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan strategis, baik RKPD Kab. Bone dan Renstra Badan pendapatan Daerah Kab. Bone. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan pada rumusan tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerjanya termasuk pada Program dan Kegiatan Tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 beserta Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2020 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2020 guna mendorong pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone yang lebih baik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah.

Watampone,

KEPALA BAPENDA KAB. BONE,

A.HERMAN, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19620724 199003 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	39
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis dalam pembangunan daerah. Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Penyusunan Rencana kerja Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone memuat substansi rencana program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja perangkat daerah Tahun 2020, rencana pendanaan dan sumber pendanaan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 Jo Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016 salah satu fungsi dan tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Pemungutan Pendapatan Daerah, disamping melaksanakan pemungutan atas beberapa Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bone memiliki target untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk mendukung hal tersebut diatas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 untuk dijadikan acuan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas baik dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah maupun dalam mengelola langsung beberapa Sumber Pendapatan Asli Daerah, agar dapat diperoleh hasil secara optimal sebagai kelanjutan dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan dan berhasil dicapai pada tahun – tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

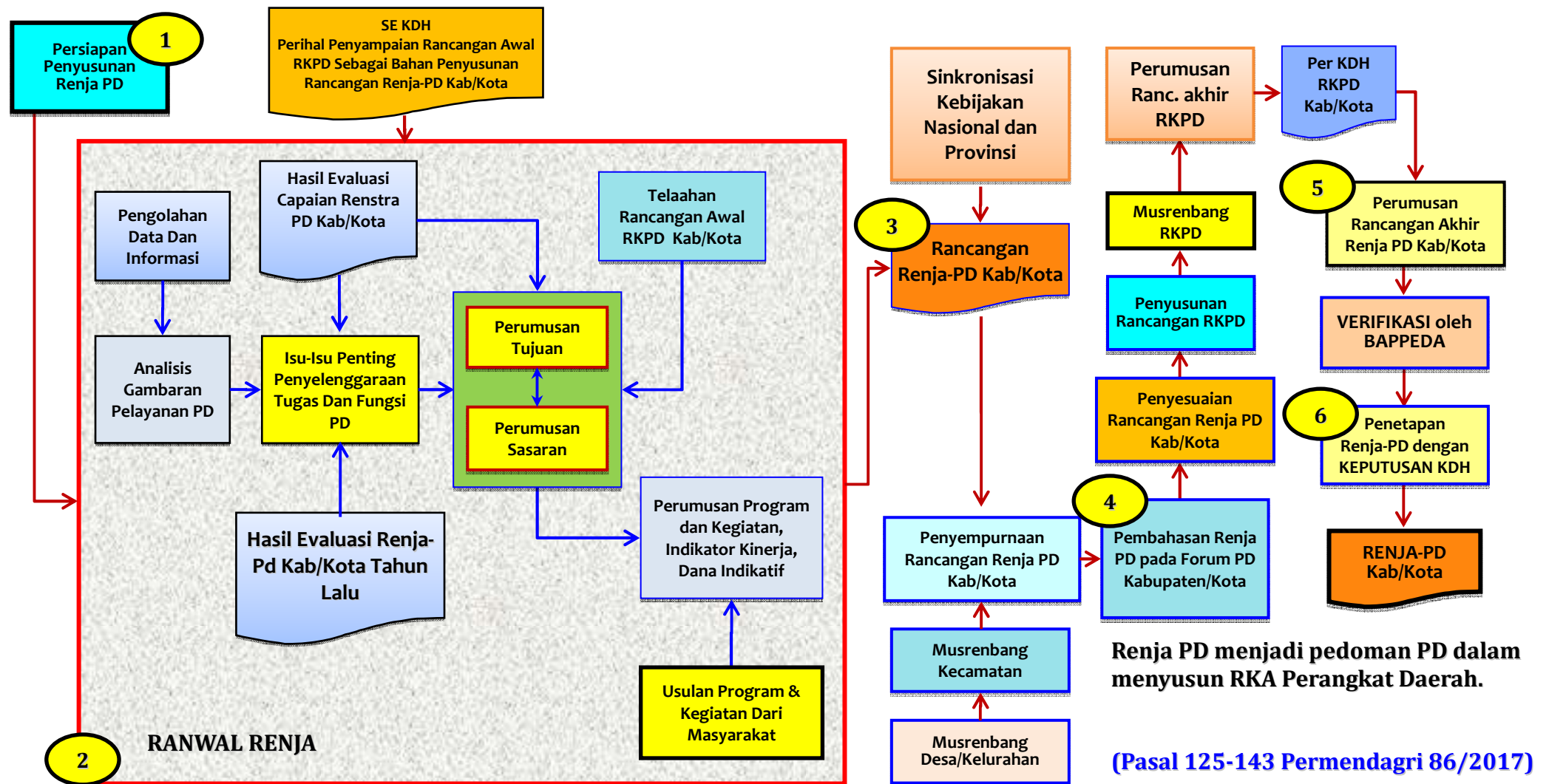
Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan RAPBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)



I.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) ;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 09 tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6) ;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3) ;
 - q. Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone ;
 - r. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone T.A 2019 ;
 - s. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone 2019, Nomor 17);

- t. Peraturan Bupati Bone Nomor..... Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melakukan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun kedepan.
2. Memudahkan aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan, program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target – target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin tercapainya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang – Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup ; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Program / Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 menggambarkan tentang perkembangan capaian Program / Kegiatan yang berkaitan di setiap bidang terkait, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O), Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Bidang Pembukuan dan Pelaporan, dan Sekretariat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018, Untuk menunjang tugas pokok, Program dan kegiatannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mendapat alokasi Dana yang telah ditetapkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15,722,158,077,00 (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 7,972,158,077,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) untuk Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7,750,000,000,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), keseluruhan Belanja Langsung dialokasikan secara efisien dalam pelaksanaan 9 Program yang terdiri dari 32 Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 955,187,000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 944,303,236,00 atau 98,86 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran dengan capaian yaitu, penyediaan dana pembayaran telepon, penambahan daya listrik dan Penyambungan Listrik.
- 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan capaian terlaksananya penatausahaan dan pengelolaan administrasi
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan capaian peningkatan wawasan aparatur untuk wacana dan informasi aktual.

- 5) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah dengan capaian terlaksananya konsultasi dan koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 6) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan capaian kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 846,495,000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 830,299,448.00 atau 98,09 % dan realisasi fisik sebesar 100 % dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, yaitu kendaraan roda empat sebanyak 1 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 3 unit dengan capaian lancarnya operasional kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor, yaitu almari, Filling Kabinet, AC 2 PK, Vacum Cleaner, Perforasi, Papan Nama Kantor dengan capaian meningkatnya dan tersedianya perlengkapan gedung perkantoran.
- 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, yaitu Komputer Note Book, Printer, hardisk, kompor gas, Piring/gelas, Peralatan dapur lainnya, Proyektor, Senter, mesin rumput dan gerobak dengan capaian meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran.
- 4) Pengadaan mebeuler, antara lain meja kerja, kursi kerja dan Rak dengan capaian tersedianya Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Kantor.
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, yaitu pemeliharaan gedung Pelayanan PBB dan Ruang Pengelola pasar dengan capaian meningkatnya kenyamanan fasilitas gedung kantor.
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, yaitu belanja jasa service kendaraan roda empat, belanja penggantian suku cadang kendaraan roda empat dan dua, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan belanja surat tanda nomor kendaraan, dengan capaian terpeliharanya kendaraan dinas pegawai untuk kelancaran operasional pengelolaan pendapatan daerah
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, yaitu pemeliharaan Komputer PC 10 unit, Note Book sebanyak 10 unit dan pemeliharaan AC 14 unit, dengan capaian terpeliharanya perlengkapan kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.000.000,00 dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 201.542.132,00 atau 91,61 % . Adapun target aparatur yang mengikuti kursus singkat / pelatihan

dan bimtek telah terlampaui dengan diikuti peserta 50 orang aparat dari target 25 orang aparat atau sebesar 200 % . Adapun kursus singkat/ pelatihan dan bimbingan tekhnis yang diikuti adalah sebagai berikut :

- a. Bimtek Laporan Keuangan sebanyak 3 orang
- b. Bimtek Penerapan Standar Akuntansi sebanyak 1 Orang .
- c. Bimtek Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah sebanyak 1 orang .
- d. Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah sebanyak 2 Orang.
- e. Bimbingan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sebanyak 30 Orang.
- f. Pelatihan audit internal ISO sebanyak 13 Orang.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesarRp. 43,500,000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 42,900,000,00 atau 98,62 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10,976.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10,971,000,00 atau 99,95 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan kegiatan :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36,000,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. - atau 0 % dan realisasi fisik sebesar 0 %, dengan kegiatan :

Karena tidak adanya pelaksanaan pameran pembangunan Tahun 2018 maka anggaran pada program ini dialihkan pada program lain dalam anggaran perubahan DPA SKPD

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesarRp. 4,479,726,000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4,459,577,608.00 atau 99,55 % atau realisasi fisik sebesar 100 %, dengan kegiatan :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah, dengan capaian terealisasinya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 267,173,137,100,00 yang dapat dicapai sebesar Rp. 279,939,142,250,46 atau 104,78 % dari penerimaan 10 jenis pajak daerah, 20 jenis retribusi daerah, 2 jenis penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 10 jenis penerimaan lain – lain PAD yang sah.

2. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan terciptanya administrasi pengelolaan PBB dengan target jumlah masyarakat yang terlayani dalam pengajuan perbaikan PBB-P2, dan jumlah pencetakan SPPT PBB yang tercetak 600.209 lembar
3. Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya dengan capaian terealisasinya target Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 36,983,033,600,00 yang dapat dicapai sebesar Rp. 44,726,076,045,25 atau 120,94 % dan Retribusi Daerah dengan target Rp. 12,671,944,000,00 dan terealisasi Rp. 12,795,043,203,00 atau 100,97 %.
4. Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, dengan capaian terlaksananya pemutakhiran Data PBB-P2 untuk meningkatkan keakuratan Data PBB-P2 pada data SISMOP yang dapat memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan penerimaan PAD di sector Pajak PBB-P2. Wilayah pemutakhiran data PBB-P2 Tahun 2017 yaitu Kelurahan Kahu, Desa Watangcani dan Desa Mattirowali Kecamatan Bontocani. Hasil (output) kegiatan terdapat penambahan Obyek Pajak sebesar 2.808 Obyek Pajak dengan nilai ketetapan pajak bertambah sebesar Rp. 47.233.603,-
5. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang Optimal. Jumlah Obyek Pajak yang telah didata pada Tahun 2017 meliputi Pajak restoran 500 ObyekPajak, Pajak Air Tanah 38 Obyek Pajak, Pajak Hiburan 6 Obyek Pajak, Pajak Hotel 39 Obyek Pajak, Pajak Minerba 450 Obyek Pajak, Pajak reklame 325 Obyek Pajak dan Pajak Sarang Burung Walet 33 Obyek Pajak.
6. Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian proses pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjalan optimal sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan penagihan. Pelaksanaan Validasi dilaksanakan secara akurat untuk meminimalisir kebocoran penerimaan PAD, dengan menerbitkan Surat Ketetapan kurang bayar bagi data BPHTB yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di lapangan. Penerimaan BPHTB yang diterima pada Tahun 2017 sebesar Rp.4,840,523,261,25 dari target sebesar Rp. 4,010,000,000,00 atau 120,71 %
7. Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan capaian terealisasinya pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.

16,743,531,594,00 dari target Rp. 15,727,789,000,00 Dengan capaian penyediaan biaya jasa administrasi pemungutan bagi Kolektor, Kepala Desa dan Camat selaku pelaksana Penagihan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Terdapat 600.209 lembar SPPT PBB yang akan ditagih kepada wajib pajak. Capaian akhir dari kegiatan ini adalah terlaksananya penagihan 569.257 lembar SPPT PBB – P2 dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 16,554,547,118

8. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan capaian semakin efektifnya pengelolaan administrasi penerimaan PBB-P2
9. Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya dengan capaian semakin efisiennya Penatausahaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga dengan capaian semakin efektifnya Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga.
11. Penyusunan Perencanaan Penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah Lainnya

Kegiatan Penyusunan Penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah Lainnya terangkum dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu dana sebesar Rp. 22.462.000,- dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, terealisasi sebesar Rp. 21.047.750,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.414.250,- dengan demikian realisasi keuangan sebesar 93,70 % dan Realisasi Fisik/kegiatan sebesar 100%.

Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengambilan data objek Pajak / Potensi Pajak dan retribusi di Kecamatan Awangpone, Barebbo, Cina, DuaBoccoe, Kahu, Kajuara, Lappariaja, Mare, Patimpeng, Ponre dan Kecamatan TelluSiattinge.
Data yang telah diperoleh dikoordinasikan dengan Bidang Pendaftaran dan Pendataan serta Bidang Penagihan.
2. Rapat penyusunan rencana penerimaan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD 2017 dan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2018 dilaksanakan pada Tanggal 16 Februari 2017 di Kantor Bapenda Kab. Bone yang dihadiri oleh 17 SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
12. Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan capaian data yang terdapat pada aplikasi

SISMIOP akurat. Pencetakan SPPT, STTS dan DHKP dilaksanakan dengan optimal , jumlah SPPT diterbitkan sebanyak 599.375 Lembar dan proses pendistribusian meliputi 44 kelurahan dan 328 Desa.

8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran Rp. 1,073,941,000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1,072,667,300,00 atau 99,88 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan :

1. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk, dengan capaian terlaksananya rehabilitasi 16 Pasar yaitu Pasar Timurung Kec. Ajangale, Pasar Waetuo Kec. T.R. Timur, Pasar Parippung Kec. Barebbo, Pasar Uloe Kec. Dua Boccoe, Pasar Panyili Kec. Dua Boccoe, Pasar Sailong Kec. Dua Boccoe, Pasar Ujung Kec. Dua Boccoe, Pasar Bulumpare Kec. Lappariaja, Pasar Bajoe Kec. T.R. Timur, Pasar Lonrong Kec. Ponre, Pasar Inp. Kading Kec. Barebbo, Pasar Inp. Bengo Kec. Bengo, Pasar Tappale Kec. Libureng, Pasar Kadai Kec. Mare, Pasar Maradda Kec. Kahu dan Pasar Lalebata Kec. Lamuru.
2. Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang dengan capaian terlaksananya penataan 16 Pasar yaitu Pasar Timurung Kec. Ajangale, Pasar Waetuo Kec. T.R. Timur, Pasar Parippung Kec. Barebbo, Pasar Uloe Kec. Dua Boccoe, Pasar Panyili Kec. Dua Boccoe, Pasar Sailong Kec. Dua Boccoe, Pasar Ujung Kec. Dua Boccoe, Pasar Bulumpare Kec. Lappariaja, Pasar Bajoe Kec. T.R. Timur, Pasar Lonrong Kec. Ponre, Pasar Inp. Kading Kec. Barebbo, Pasar Inp. Bengo Kec. Bengo, Pasar Tappale Kec. Libureng, Pasar Kadai Kec. Mare, Pasar Maradda Kec. Kahu dan Pasar Lalebata Kec. Lamuru.

9. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan, dengan alokasi anggaran Rp.120,175,000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 120,032,500,00 atau 99,88 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan :

1. Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan capaian adalah sebagai berikut :

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terangkum dalam Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan dengan Pagu Dana Rp. 114.874.000,- dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan, terealisasi sebesar Rp. 109.365.649,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.508.351,- dengan demikian realisasi keuangan sebesar 95,21 % dan Realisasi Fisik/kegiatan sebesar 100%.

- **Sosialisasi kepada para Bendahara Pengeluaran.**

Sosialisasi kepada para Bendahara Pengeluaran telah dilaksanakan pada Tanggal 7 Maret 2016, di Hotel Novena yang diikuti oleh 69 orang peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Kecamatan.

Materi yang diberikan kepada peserta berupa penjelasan tentang kebijakan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran atas pembelanjaan sewa tempat dan pembelanjaan makanan dan minuman pada kegiatan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemungutan Pajak Restoran ini dipungut melalui Bendahara Pengeluaran. Peserta sangat antusias mengikuti acara dengan mengajukan pertanyaan.

- **Sosialisasi melalui media massa/ media cetak.**

Sosialisasi melalui media massa/media cetak dilaksanakan dengan memasang iklan Himbauan Pembayaran Pajak dan Retribusi pada Koran/Media cetak.

- **Sosialisasi kepada masyarakat dan para pejabat di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.**

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui pertemuan langsung kepada masyarakat baik di rumah maupun di tempat usaha.

Sosialisasi kepada masyarakat juga dilaksanakan melalui pemasangan informasi pencapaian Penerimaan PAD dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi di lokasi Pameran Bone Fair.

Sosialisasi juga dilaksanakan dengan menyebarkan leaflet Pajak Daerah serta memberikan pemahaman kepada pejabat/aparat di 22 Kecamatan dan 5 Desa.

Dari keseluruhan Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2018, dengan alokasi dana yang dianggarkan melalui program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.750.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 7.682.293.224,00 atau 99,13 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 67.706.776,00 yang merupakan penghematan dana dari beberapa program/ kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone s/d Tahun 2019 (Triwulan 1)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1				Urusan Wajib									
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)	100		100	100	100	100	100	100
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon & Listrik (Rekening)	12		12	12	100	12	3	25%
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Pendukung Yang Mendapatkan Pembayaran Jasa Adm. Dan Asuransi (Orang)	672		672	672	100	672	3	25%
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	15		15	15	100	15	5 jenis	33%
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media Yang Menyediakan Bahan Bacaan (Media)	35		35	35	100	35	7	11.43%
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Diikuti (Kegiatan)	130		130	41	31.50	130	11 Kegiatan	8,46 %
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (paket)	12		12	12	100	12	3	25%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	20	02		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran (Persen)	100		100	100	100	100		
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Unit) • Mobil • Motor	1		• 1 • 5	• 1 • 5	100%	1	1	100%
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	4		5 Jenis • Almari • Filling Kabinet • AC • Sound System • TV LED	5 Jenis • Almari • Filling Kabinet • AC • Sound System • TV LED	100%	4	-	-
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis)	4		5 Jenis • Alat Absensi • Laptop • Printer • Printer Pita • Hard Disk	5 Jenis • Alat Absensi • Laptop • Printer • Printer Pita • Hard Disk •	100%	4	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1 20 02 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor (Buah)	27		6 Buah • Meja Kerja • Meja Komput er • Kursi Kerja	6 Buah 6 Buah • Meja Kerja • Meja Komput er • Kursi Kerja	100%	27	-	-
1 20 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara (Unit)	1		1	1	100%	1	-	-
1 20 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin selama setahun anggaran (Unit)	35		35	35	100%	35	7 Unit	20%
1 20 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (Unit)	49		49	49	100%	49	-	-
1 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100%		100%	100%	100%	100%	-	-
1 20 03 06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN (Pasang)	150		150	150	100%	150	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Realisasi Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan (Persen)		100	100	100	100	25	5	20
1	20	05	01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Formal (Orang)	2		25	25	100	25	5	20
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap Tahun Anggaran (Persen)	100	100	100	100	100	100	3 Dokumen	100
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Tersusun (Dokumen)	3		3	3	100	3	3	100
1	20	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran (Persen)	100		100	100	100	100		
1	20	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang tersusun (dokumen)	3		3	3	100%	3	3	100%
1	20	08	03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran dan Promosi Yang diikuti (Kegiatan)	1					1	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	20	17		Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target (Persen)	100		100	100	100	100	100	
1	20	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD (Pengawasan, Perluasan & Penggalan)	3		3	3	100	3	3	100
1	20	17	70	Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2	Jumlah Pelayanan PBB-P2 Yang Diberikan kepada wajib pajak (Layanan)	6		6	6	100	6	6	100
1	20	17	71	Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah & Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Lainnya (Jenis)	8		8	8	100	8	8	100
1	20	17	72	Pemutakhiran Data Objek PBB-P2	Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data PBB-P2 (Paket)	2		2	2	2	2	-	-
1	20	17	73	Pendaftaran & Pendataan Wajib Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Daerah & Retribusi Daerah Yang dikelola pendataanya secara berkala (WP & WR)	750		750	750	100	750	940	125

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	20	17	74	Penerbitan & Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penerbitan dan distribusi ketetapan pajak daerah & retribusi daerah (Dokumen)	5		5	5	100%	5	5	100%
1	20	17	75	Operasional Penagihan PBB-P2	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Pemungutan bagi kolektor dan kepala desa selaku pelaksana penagihan PBB-P2 (Orang)	504		504	504	100%	504	179 OB	35,51%
1	20	17	76	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan PBB-P2	Jumlah Dokumen Penerimaan PBB-P2 (Dokumen)	4		4	4	100%	4	4	100%
1	20	17	77	Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah (Dokumen)	6		6	6	100%	6	6	100%
1	20	17	78	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga	Jumlah dokumen laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga (Dokumen)	10		10	10	100%	10	10	100%
1	20	17	80	Penerbitan & Distribusi Dokumen Ketetapan PBB-P2	Jumlah Dokumen Penerbitan & Distribusi SPPT, STTS dan DHKP (Dokumen)	3		3	3	100%	3	3	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	20	17	84	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Jumlah Pasar Yang Dioptimalkan Pemungutan Retribusinya (Pasar)	83		83	83	100%	83	83	100%
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kenaikan Objek Pajak Daerah Setiap Tahun	100		100	100	100	100	-	-
1	20	26	08	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Orang)	150		100	100	100	150	-	-

Keterangan : Realisasi Target Kinera Tahun 2017 Tidak dimasukkan karena masih mengacu pada Renstra Tahun 2013-2018

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah baik mengkoordinir seluruh kegiatan Penerimaan Daerah maupun dalam mengelola langsung beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah, mendapat dukungan pembiayaan yang secara jelas tercantum dalam APBD Kabupaten Bone.

Tinjauan Evaluasi atas kinerja pelayanan Bapenda Kab. Bone Tahun 2018 dilakukan dengan menghitung persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pendapatan Daerah dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD Kab. Bone Tahun 2018. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selaku koordinator Penerimaan Pendapatan Daerah mengkoordinir Penerimaan PAD yang dikelola oleh 17 (Tujuh Belas) OPD.

Dari 30 (tiga puluh) Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018, terdapat 14 (empat belas) jenis yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari :

a. Sektor Pajak Daerah mengelola sepuluh jenis yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

b. Sektor Retribusi Daerah mengelola Empat jenis yaitu:

1. Retribusi Pasar:
 - Pasar Sentral Watampone;
 - Pasar Inpres dan Non Inpres
2. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Pemakaian Rumah Daerah;
 - Pemakaian BTC.
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung Pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp.41.232.620.600,- dan berhasil direalisasikan sampai akhir Tahun Anggaran sebesar Rp.53.847.736.220,-atau 130,59 %.

Dengan demikian, Penerimaan yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam Tahun 2018 memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD sebesar 25,13 % atas realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

Adapun capaian Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2017 dan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan capaian Realisasi PAD khusus yang dikelola Bapenda Kab. Bone dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :



TABEL 2.2
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017 - TAHUN 2018

KATEGORI PENDAPATAN	TAHUN 2017		%	TAHUN 2018		%	PENINGKATAN REALISASI	
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		NILAI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DAERAH	267.173.137.100,00	280.478.099.485,00	104,98	199.472.831.779,00	214.246.216.580,41	107,41	- 65.692.925.670,05	- 23,42
	36.983.033.600,00	44.726.076.045,25	120,94	41.636.794.167,00	51.236.484.457,00	123,06	6.510.408.411,75	14,56
	12.671.944.000,00	12.795.043.203,00	100,97	22.455.566.712,00	19.652.213.419,00	87,52	6.857.170.216,00	53,59
KEKAYAAN BAHAN	6.364.434.900,00	6.727.965.905,22	105,71	7.092.406.600,00	7.055.937.640,00	99,49	327.971.734,78	4,87
SUMBER DAYA ALAM DAERAH	211.153.724.600,00	215.690.057.096,99	102,15	128.288.064.300,00	136.301.581.064,41	106,25	79.388.476.032,58	36,81
DAERAH	1.555.594.547.000,00	1.512.633.984.416,00	97,24	1.568.604.640.867,00	1.548.309.677.324,00	98,71	35.675.692.908,00	2,36
PAJAK/BAGI HASIL	38.130.058.000,00	31.407.240.349,00	82,37	30.388.132.867,00	23.302.043.707,00	76,68	8.105.196.642,00	- 25,81
DAERAH	1.069.494.543.000,00	1.069.494.543.000,00	100,00	1.070.426.493.000,00	1.070.426.493.000,00	100,00	931.950.000,00	0,09
SUSUTAN	447.969.946.000,00	411.732.201.067,00	91,91	467.790.015.000,00	454.581.140.617,00	97,18	42.848.939.550,00	10,41
DAERAH YG	413.988.168.000,00	408.587.592.759,00	98,70	502.079.114.000,00	489.041.665.675,00	97,40	80.454.072.916,00	19,69
	-	-	-	91.765.615.000,00	84.489.169.245,00			
DAERAH PROVINSI DAN	81.104.000.000,00	76.881.029.359,00	94,79	74.983.000.000,00	72.110.586.785,00	96,17	4.770.442.574,00	- 6,20
DAERAH LAINNYA								
DAERAH OTONOMI	306.940.168.000,00	306.700.190.600,00	99,92	307.386.499.000,00	306.620.285.200,00	99,75	79.905.400,00	- 0,03
DAERAH DARI PROVINSI	25.944.000.000,00	25.006.372.800,00	96,39	27.944.000.000,00	25.821.624.445,00	92,40	815.251.645,00	- 3,26
DAERAH LAINNYA								
DAERAH	2.236.755.852.100,00	2.201.699.676.660,00	98,43	2.270.156.586.646,00	2.251.597.559.579,41	99,18	50.436.840.153,95	2,29

TABEL 2.3
TARGET DAN REALISASI PAD YANG DIKELOLA BAPENDA TAHUN 2017 - TAHUN 2018

URAIAN	TAHUN 2017		%	TAHUN 2018		%	PENINGKATAN REALISASI	
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		NILAI (Rp)	%
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	203.940.000,00	331.093.376,00	162,35	457.700.567,00	634.041.902,00	138,53	302.948.526,00	91,50
	1.039.030.000,00	2.428.834.859,00	233,76	1.439.030.000,00	3.265.565.891,00	226,93	836.731.032,00	34,45
	181.000.000,00	136.431.776,00	75,38	181.000.000,00	196.421.080,00	108,52	59.989.304,00	43,97
	416.300.000,00	613.437.550,00	147,35	416.300.000,00	764.216.925,00	183,57	150.779.375,00	24,58
ALAN	14.942.337.000,00	18.935.573.944,00	126,72	18.942.337.000,00	21.500.315.479,00	113,50	2.564.741.535,00	13,54
AN LOGAM DAN BATUAN	400.000.000,00	583.903.367,00	145,98	400.000.000,00	400.424.196,00	100,11	- 183.479.171,00	- 31,42
	52.637.600,00	88.846.318,00	168,79	52.637.600,00	104.198.980,00	197,96	15.352.662,00	17,28
NG WALET	10.000.000,00	23.900.000,00	239,00	10.000.000,00	22.500.000,00	225,00	- 1.400.000,00	- 5,86
NAN PERDESAAN &	15.727.789.000,00	16.743.531.594,00	106,46	15.727.789.000,00	17.178.532.694,00	109,22	435.001.100,00	2,60
ATAS TANAH DAN BANGUNAN	4.010.000.000,00	4.840.523.261,25	120,71	4.010.000.000,00	7.170.267.310,00	178,81	2.329.744.048,75	48,13
AN PASAR	2.416.818.000,00	2.200.383.000,00	91,04	2.416.818.000,00	2.159.107.000,00	89,34	- 41.276.000,00	- 1,88
OSIR / PERTOKOAN	46.656.000,00	68.544.000,00	146,91	46.656.000,00	79.776.000,00	170,99	11.232.000,00	16,39
N KEKAYAAN DAERAH	171.113.000,00	114.020.000,00	66,63	171.113.000,00	107.800.000,00	63,00	- 6.220.000,00	- 5,46
HUSUS PARKIR	15.000.000,00	17.800.000,00	118,67	15.000.000,00	20.300.000,00	135,33	2.500.000,00	14,04
JUMLAH	39.632.620.600,00	47.126.823.045,25	118,91	44.286.381.167,00	53.603.467.457,00	121,04	6.476.644.411,75	13,74

Badan Pendapatan Daerah Kab.Bonetidak memiliki indikator kinerja beserta target dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Namun demikian, terdapat satu Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu “*Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah*”. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah untuk lima tahun hanya mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023, dimana capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dinyatakan dalam 2 sasaran strategis & 2 indikator kerjanya.

Kedua indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4
IKU Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-Rata Kenaikan PAD	%	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Realisasi PAD Thn ini} - \text{Realisasi PAD Tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD Tahun Lalu}} \times 100$ Sumber Data : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100$ Sumber Data : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2019 (Triwulan 1) untuk pencapaian target jangka menengah Renstra Tahun 2018-2023, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapenda Kab. Bone hingga Tahun 2019 (Triwulan I) dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2021

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Keterangan
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah												
1	Persentase Rata-Rata Kenaikan PAD	-	-	(25,34)	0,64	5,90	6,47	(23,61)	(84,08)	5,90	6,47	
	Catatan Analisis : Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 214.246.216.580,41 (data sebelum audit BPK) terdapat penurunan sebesar Rp. 66.231.882.905,05 atau (23,61) % hal ini disebabkan karena adanya pengalihan penempatan pos/rekening penerimaan Pendapatan Dana Transfer (Dana Bos) yang semula pada Tahun 2017 ditempatkan pada pos/rekening penerimaan Lain-lain PAD yang sah yang pada Tahun 2018 beralih penempatannya pada pos penerimaan lain-lain Pendapatan yang sah berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. Disisi Lain apabila penempatan pos/rekening penerimaan Dana bos ini tidak dimasukkan ke dalam penerimaan Lain-Lain PAD yang sah maka Realisasi PAD Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2017 sebesar 11,69 % . Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2019 (Triwulan I) sebesar Rp. 34.113.418.007,39 dari semula pada Tahun 2018 sebesar Rp. 214.246.216.580,41 atau (84,08) %											
Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah												
2	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	-	-	9,51	9,03	9,05	9,07	9,52	6,24	9,05	9,07	
	Catatan Analisis : Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Bone masih di bawah 20 % (dua puluh persen) hal ini disebabkan karena sektor penyumbang terbesar pada PDRB (Product Domestic Regional Bruto) Kab. Bone adalah sektor pertanian. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sektor hasil pertanian bukan merupakan obyek secara langsung dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Kedepannya, masih Perlu mencari alternatif lain yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Daerah diluar Pajak Daerah seperti Pemberdayaan Aset Daerah dan melalui penyertaan modal Daerah pada lembaga keuangan yang sehat yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor deviden.											

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone, Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagaimana Pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 90 Tahun 2016 yaitu

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ;
2. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Kontribusi/Rasio PAD terhadap APBD masih rendah
2. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak belum memadai.
3. Instrumen Perpajakan yang digunakan dalam penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan belum memadai/tersedia seperti Pemeriksa Pajak, Juru Sita Pajak, dan Penyidik Perpajakan.

Kekuatan :

1. aturan tingkat daerah cukup memadai dan jelas pelaksanaannya;
2. potensi obyek pajak yang belum tergali cukup banyak;
3. jumlah SDM Bapenda memadai.

Tantangan :

1. masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2. belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan;
3. inefisiensi dalam pemungutan retribusi terutama yang *uncontrollable* oleh Bapenda.
4. luas wilayah kabupaten Bone menyebar sehingga kesulitan untuk mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih besar dib
5. andingkan nilai obyek pajak;
6. peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah.

Peluang :

1. potensi obyek pajak yang masih banyak dan belum tergali;
2. ada kesempatan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur pelayanan pasar dan pelabuhan rakyat sebagai pendukung pungutan retribusi;

Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2020 yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Realisasi Pendapatan Daerah ;
- b. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan

RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2020 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini:



Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2020- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bapenda	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran (Persen)	100	908.568.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bapenda	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran (Persen)	100	908.568.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon dan Listrik (Rekening)	12	55.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon dan Listrik (Rekening)	12	55.000.000	
2	Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan	Bapenda	Jumlah Tenaga Pendukung Yang Mendapatkan pembayaran jasa adm. Dan asuransi (Kali)	672	362.568.000	Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan	Bapenda	Jumlah Tenaga Pendukung Yang Mendapatkan pembayaran jasa adm. Dan asuransi (Kali)	672	362.568.000	
3	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	12	9.000.000	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	12	9.000.000	
4	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Jumlah Media yang menyediakan bahan bacaan (Media)	36	42.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Jumlah Media yang menyediakan bahan bacaan (Media)	36	42.000.000	
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Bapenda	Jumlah Rakor dan konsultasi yang diikuti (Kegiatan)	132	200.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Bapenda	Jumlah Rakor dan konsultasi yang diikuti (Kegiatan)	137	200.000.000	
6	Pelaksanaan Administrasi	Bapenda	Jumlah Penunjang pelaksanaan	108	240.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Bapenda	Jumlah Penunjang pelaksanaan	108	240.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perkantoran		administrasi perkantoran (Paket)					administrasi perkantoran (Paket)			
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Bapenda	Cakupan Realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran (Persen)	100%	885.000.000	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Bapenda	Cakupan Realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran (Persen)	100%	885.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bapenda	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Unit)	1	430.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bapenda	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Unit)	1	430.000.000	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bapenda	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Jenis)	4	35.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bapenda	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Jenis)	4	35.000.000	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bapenda	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Jenis)	4	65.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bapenda	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Jenis)	4	65.000.000	
4	Pengadaan Mebeleur	Bapenda	Jumlah Pengadaan mebeleur kantor (Jenis)	6	30.000.000	Pengadaan Mebeleur	Bapenda	Jumlah Pengadaan mebeleur kantor (Jenis)	6	30.000.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bapenda	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (Unit)	1	150.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bapenda	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (Unit)	1	150.000.000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Bapenda	Jumlah kendaraan dinas/operasionai yang dipelihara dan	40	150.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Bapenda	Jumlah kendaraan dinas/operasionai yang dipelihara dan	40	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Operasional		dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin selama setahun anggaran (Unit)					dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin selama setahun anggaran (Unit)			
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bapenda	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (Jenis)	8	25.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bapenda	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (Jenis)	8	25.000.000	
3	Program Peningkatan Displin Aparatur	Bapenda	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Displin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran (Persen)	100%	75.000.000	Program Peningkatan Displin Aparatur	Bapenda	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Displin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran (Persen)	100	75.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas	Bapenda	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN (Pasang)	150	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas	Bapenda	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN (Pasang)	150	75.000.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bapenda	Cakupan Realisasi Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan (Persen)	100%	250.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bapenda	Cakupan Realisasi Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan (Persen)	100	250.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bapenda	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Formal (Orang)	2	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bapenda	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Formal (Orang)	2	60.000.000	
2	Bimbingan Teknis	Bapenda	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis dan Pelatihan (Orang)	25	190.000.000	Bimbingan Teknis	Bapenda	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis dan Pelatihan	25	190.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								(Orang)			
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bapenda	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap Tahun Anggaran (Persen)	100	10.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bapenda	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap Tahun Anggaran (Persen)	100	10.000.000	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (dokumen)	3	10.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (dokumen)	3	10.000.000	
6	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Bapenda	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran (Persen)	100	95.000.000	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Bapenda	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran (Persen)	100	95.000.000	
1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun (Dokumen)	3	55.000.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun (Dokumen)	3	55.000.000	
2	Promosi dan Pameran Pembangunan	Bapenda	Jumlah Pameran dan Promosi Yang Diikuti (Kegiatan)	1	40.000.000	Promosi dan Pameran Pembangunan	Bapenda	Jumlah Pameran dan Promosi Yang Diikuti (Kegiatan)	1	40.000.000	Jumlah Pameran dan Promosi Yang Diikuti (Kegiatan)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bapenda	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target (Persen)	100	6.054.224.400	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bapenda	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target (Persen)	100	6.064.224.400	
1	Intesifikasi & Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Bapenda	Jumlah Kegiatan Intensifikasi & Ekstensifikasi PAD (Pengawasan, Perluasan & Penggalian objek pajak yang dilaksanakan (Jenis)	3	760.627.000	Intesifikasi & Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Bapenda	Jumlah Kegiatan Intensifikasi & Ekstensifikasi PAD (Pengawasan, Perluasan & Penggalian objek pajak yang dilaksanakan (Jenis)	3	760.627.000	
2	Pengelolaan PBB-P2	Bapenda	Jumlah Pelayanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak (Layanan)	6	560.225.000	Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2	Bapenda	Jumlah Pelayanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak (Layanan)	6	560.225.000	
3	Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak daerah Lainnya	Bapenda	Jumlah Kegiatan Penagihan Retribusi Daerah & Pajak Daerah Lainnya (Jenis)	8	150.732.400	Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak daerah Lainnya	Bapenda	Jumlah Kegiatan Penagihan Retribusi Daerah & Pajak Daerah Lainnya (Jenis)	8	150.732.400	
4	Pemutakhiran Data Objek PBB-P2	Kec. Amali, Kec.Awangpone, Kec.Bontocani, Kec. Cenrana, Kec.	Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data PBB-P2 (Paket)	2	856.000.000	Pemutakhiran Data Objek PBB-P2	Kec. Amali, Kec.Awangpone, Kec.Bontocani, Kec. Cenrana, Kec.	Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data PBB-P2 (Paket)	2	856.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cina, Kec.Kahu, Kec. Palakka, Kec. Tellu Siattinge					Cina, Kec.Kahu, Kec. Palakka, Kec. Tellu Siattinge				
5	Pendaftaran & Pendataan Wajib Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Wajib Pajak Daerah & Retribusi Daerah Yang dikelola pendataanya secara berkala (WP & WR)	800	130.315.000	Pendaftaran & Pendataan Wajib Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Wajib Pajak Daerah & Retribusi Daerah Yang dikelola pendataanya secara berkala (WP & WR)	800	130.315.000	
6	Penerbitan & Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak	Bapenda	Jumlah dokumen Penerbitan dan distribusi ketetapan pajak daerah retribusi daerah (Dokumen)	5	150.657.000	Penerbitan & Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak	Bapenda	Jumlah dokumen Penerbitan dan distribusi ketetapan pajak daerah retribusi daerah (Dokumen)	5	150.657.000	
7	Operasional Penagihan PBB-P2	Bapenda	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Pemungutan bagi kolektor dan kepala desa selaku pelaksana penagihan PBB (Orang)	504	2.079.609.000	Operasional Penagihan PBB-P2	Bapenda	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Pemungutan bagi kolektor dan kepala desa selaku pelaksana penagihan PBB (Orang)	504	2.079.609.000	
8	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan PBB-P2	Bapenda	Jumlah Dokumen Penerimaan PBB-P2 (Dokumen)	4	155.000.000	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan PBB-P2	Bapenda	Jumlah Dokumen Penerimaan PBB-P2 (Dokumen)	4	155.000.000	
9	Penatausahaan Penerimaan Pajak	Bapenda	Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak	6	124.000.000	Penatausahaan Penerimaan Pajak	Bapenda	Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak	6	124.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah		Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah (Dokumen)			Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah		Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah (Dokumen)			
10	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah & Pengelolaan Benda Berharga	Bapenda	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga (Dokumen)	10	576.928.000	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah & Pengelolaan Benda Berharga	Bapenda	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga (Dokumen)	10	576.928.000	
11	Penerbitan & Distribusi Dokumen Ketetapan PBB-P2	Bapenda	Jumlah dokumen Penerbitan dan Distribusi SPPT, STTS dan DHKP(Dokumen)	3	340.000.000	Penerbitan & Distribusi Dokumen Ketetapan PBB-P2	Bapenda	Jumlah dokumen Penerbitan dan Distribusi SPPT, STTS dan DHKP(Dokumen)	3	340.000.000	
12	Pengawasan Penerimaan Retribusi Pasar	Bapenda	Jumlah Pasar Yang Dioptimalkan Pemungutan Retribusinya (Pasar)	83	170.131.000	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Bapenda	Jumlah Pasar Yang Dioptimalkan Pemungutan Retribusinya (Pasar)	83	170.131.000	
8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Persentase Kenaikan Objek Pajak Daerah Setiap Tahun (Persen)	100	201.054.000	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Persentase Kenaikan Objek Pajak Daerah setiap Tahun (Persen)	100	201.054.000	
1	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Orang)	150	201.054.000	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Orang)	150	201.054.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional serta aturan-aturan pelaksanaanya, rencana program dan kegiatan dititik beratkan dari usulan masyarakat baik yang diperoleh pada saat kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musrembang maupun yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ikut pada saat kegiatan musrembang, maka diperoleh usulan program dan kegiatan untuk Tahun 2020 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Adapun Usulan program dan kegiatan Hasil Musrembang Tahun 2020 sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ❖ Pemutakhiran Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kec. Cina <ul style="list-style-type: none"> - Walenreng - Tanete ➤ Kec. Kahu <ul style="list-style-type: none"> - Desa Tompong Patu ➤ Kec.Awangpone <ul style="list-style-type: none"> - Lattekko - Mallari ➤ Kec. Palakka <ul style="list-style-type: none"> - Mico ➤ Kec.T.Siattinge <ul style="list-style-type: none"> - Lanca - Lappae ➤ Kec. Cenrana <ul style="list-style-type: none"> - Labotto ➤ Kec. Amali <ul style="list-style-type: none"> - Waempubbu - Wellulang - Dusun Barang - Dusun Jampae - Benteng Tellue ➤ Kec. Bontocani <ul style="list-style-type: none"> - Bulusirua 	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target	2 paket	Daftar Usulan hasil Musrenbang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah Dokumen perencanaan yang substansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dan merupakan koridor dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.

Telaahan terhadap kebijakan ini dimaksudkan untuk mengetahui arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Bone 2020 yaitu “ Akselerasi Pembangunan yang Mandiri dan Berdaya Saing” yang mengacu pada kebijakan Pembangunan Nasional, tentunya akan menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Prioritas Pembangunan Tahun 2020 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak yang implementasinya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dengan melaksanakan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui program dan kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kab. Bone Tahun 2020 yang ditetapkan sebagai konsep awal (rancangan teknokratis) dalam masa transisi Pemerintahan Kab. Bone dari Periode Lima Tahun sebelumnya (Tahun 2013-2018) menuju Periode Lima Tahun selanjutnya (Tahun 2018-2023) adalah sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023 , yaitu :

Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Sesuai misi tersebut di atas dan sejalan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan rumusan sasaran target kinerja rancangan awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone untuk Tahun 2020.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

Tujuan 1 : *Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.*

Dengan **Sasaran** :

1. *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.*
2. *Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.*

Tujuan 2 : *Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah*

Dengan **Sasaran** :

3. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pendapatan Daerah*

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan dalam Tahun Anggaran 2020 lebih lanjut dijabarkan sesuai tugas dan fungsi yang ada serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut :

A. BIDANG UMUM

1. Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta program ;
2. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ;
3. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah ;
4. Pelaksanaan pembinaan urusan umum dan administrasi kepegawaian ;
5. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca ;

6. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah ;
7. Melaksanakan Peningkatan Pengetahuan aparat Bapenda .

B. BIDANG PERENCANAAN

1. Meninjau dan melakukan Perubahan Peraturan Daerah yang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, utamanya Peraturan Daerah yang usianya di atas 3 (tiga) tahun maupun Perubahan Peraturan Daerah yang belum mencapai 3 (tiga) tahun tetapi situasi dan kondisi objek / subjek memungkinkan untuk diadakan perubahan;
2. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak;
3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang baru sebagai usaha Ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
4. Melaksanakan Rapat minimal sekali setiap triwulan dengan satuan kerja perangkat daerah untuk mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah dalam APBD;
5. Melaksanakan evaluasi, penyempurnaan sistim, prosedur dan mekanisme kerja dalam pelaksanaan manual Pendapatan Daerah;
6. Memberikan Penyuluhan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Mengadakan Evaluasi Langsung pada Pelaksana Pemungutan dalam Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dengan maksud :
 - a. Pemantapan Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain – lain Pendapatan Daerah;
 - b. Mengevaluasi keadaan fasilitas penyelenggaraan (Sarana dan Prasarana).
8. Memberikan target operasional Pelaksana Pemungutan dengan maksud mengamankan Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone;
9. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis bagi para Petugas Pengelola PBB – P2 dan Para Koordinator Pemungut, Pembantu Bendahara Khusus Penerima serta unsur yang ada kaitannya dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah .
10. Melaksanakan Intensifikasi dan Pengendalian atas pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

C. BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

1. Mengadakan pendataan objek / subjek Pajak Hotel, Restoran, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet dan BPHTB serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Tambang C) serta objek PBB – P2;
2. Mengadakan pendataan objek / subjek Golongan Badan Usaha yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Bone;
3. Menindak lanjuti SPPT PBB yang bermasalah seperti Double Penetapan, Pengenaan Pajak yang tidak sesuai dengan NJOP dan Penetapan PBB fiktif dengan jalan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone dan melakukan Intensifikasi Penagihan PBB tahun sebelumnya (Tunggakan);
4. Melakukan perubahan data melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
5. Memberikan penghargaan kepada para Camat, Kepala Desa dan Lurah yang berprestasi dalam Pengelolaan PBB;

D. BIDANG PENAGIHAN

1. Mencari data sekaligus melaksanakan Penagihan atas Hak Pemerintah Kabupaten Bone dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
2. Akan mengembangkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
3. Melaksanakan penyerahan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada para Camat, Kepala Desa / Lurah;
4. Melaksanakan Penagihan sementara dan penagihan piutang Pajak dan Retribusi Daerah ;
5. Mengadakan uji petik penerimaan Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir;
6. Membentuk Tim Inventarisasi dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

E. BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

1. Melaksanakan Pemeriksaan rutin pada pelaksana pemungutan dilingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone;
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola PAD;
3. Melakukan Bimbingan Tekhnis pada aparat pelaksana Pengelola Pendapatan Daerah;

4. Melakukan Pengendalian / Penelitian Dokumen hasil pengelolaan Pendapatan Daerah yang dipungut oleh Pelaksana Tekhnis dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone;
5. Monitoring, pengawasan internal dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
6. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pengawasan Intern / Ekstern dalam rangka pemutakhiran data hasil tindak lanjut ;
7. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lain terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah.

F. BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

1. Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan pembukuan, penerimaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta poengelolaan benda berharga ;
2. Pencatatan penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
3. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya secara berkala ;
4. Perencanaan kebutuhan pemakaian benda berharga ;
5. Pembuatan Laporan persediaan benda berharga secara berkala ;
6. Penyajian data dan informasi tentang penerimaan Pendapatan Daerah.

Indikator kinerja (*dampak*) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2020, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1*Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program Tahun 2020 – Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone*

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET SASARAN (TAHUN 2020)	PROGRAM
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	15,56	5,90	➤ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,00	9,05	➤ Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2	Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Pendapatan Daerah	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	A	B	<ul style="list-style-type: none">➤ Program Pelayanan Adm. Perkantoran➤ Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur➤ Program Peningkatan Disiplin Aparatur➤ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur➤ Program Penunjang Pemerintahan Umum➤ Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & keuangan

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kriteria kegiatan adalah Spesifik, terukur, berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023, maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

A. Program dan Kegiatan Prioritas

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1). Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
 - 2). Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 3). Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya
 - 4). Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
 - 5). Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 6). Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 7). Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 8). Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 9). Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah
 - 10). Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga

- 11). Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 12). Pengawasan Penerimaan Retribusi Pasar
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - 1). Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Program dan Kegiatan Penunjang

1. Program Penunjang Pemerintahan Umum
 - 1). Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
 - 2). Penyelenggaraan Pameran Investasi
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 2). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 3). Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 4). Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
 - 6). Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1). Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
 - 2). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 3). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 4). Pengadaan Mabeleur
 - 5). Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
 - 6). Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
 - 7). Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1). Pendidikan Dan Pelatihan Formal
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2020 terdiri dari 8 Program dan 31 Kegiatan, yang terbagi atas 2 Program Prioritas dengan 13 Kegiatan dan 6 Program Pendukung dengan 18 Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, seperti tersaji pada Bab III sebelumnya. Dengan alokasi dana yang dianggarkan melalui program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 8.618.278.400 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bone.

Setelah melalui penyesuaian terhadap pagu indikatif yang ditetapkan, termasuk penyesuaian target outcome/output program dan kegiatan, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021- Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiaktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	20	01		Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran (Persen)	Bapenda	100	908,568,000	DAU- APBD	Program Pendukung	100	937,068,000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon dan Listrik (Rekening)	Bapenda	12	55,0000,000	DAU- APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12	60,000,000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Admnistrasi Perkantoram	Jumlah Tenaga Pendukung Yang Mendapatkan Pembayaran Jasa administrasi dan asuransi selama setahun (Kali)	Bapenda	672	362,568,000	DAU- APBD	Disertai pemberian asuransi ketenagakerjaan sebagai kewajiban pemerintah	672	362,658,000
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	Bapenda	12	9,000,000	DAU- APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan per triwulan	12	9,500,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (Paket)	Bapenda	36	42,000,000	DAU- APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan per bulan	36	45,000,000
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah rakor dan konsultasi yang diikuti (Kegiatan)	Bapenda	132	200,000,000	DAU- APBD	Terdiri dari kegiatan rapat— rapat di tingkat nasonal, provinsi & Kabupaten	135	210,000,000

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiaktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	Jumlah penunjang pelaksanaan admnistrasi perkantoran (Paket)	Bapenda	108	240,000,000	DAU- APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan (ATK, Cetakan, Penggandaan dan Makan Minum	108	250,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran (Persen)	Bapenda	100	885,000,000	DAU- APBD	Program Pendukung	100	910,000,000
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Unit)	Bapenda	1	430,000,000	DAU- APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan operasional pengawasan	1	430,000,000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	Bapenda	5	35,000,000	DAU- APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang belum memadai	6	40,000,000
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (jenis)	Bapenda	4	65,000,000	DAU- APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan kantor yang masih kurang untuk pelayanan administrasi	4	70,000,000

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiaktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										perkantoran		
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor (Jenis)	Bapenda	6	30,000,000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas	6	35,000,000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	Bapenda	1	150,000,000	DAU-APBD	Terdiri dari 3 Paket Yaitu Pemeilharaan Gedung Kantor, Perencanaan Dan Pengawasan	1	150,000,000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin selama setahun anggaran (Paket)	Bapenda	40	150,000,000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak sesuai estimasi	43	160,000,000
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (Jenis)	Bapenda	8	25,000,000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan	8	25,000,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Displin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran (Persen)	Bapenda	100	75,000,000	DAU-APBD	Program Pendukung	100	75,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiaktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	20	03	06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN (Pasang)	Bapenda	150	75,000,000	DAU-APBD	Paket Pengadaan berdasarkan Kebutuhan Pakaian Dinas ASN	150	75,000,000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Realisasi Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan (Persen)	Bapenda	100%	60,000,000	DAU-APBD	Program Pendukung	2 Orang	60,000,000
1	20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal (Orang)	Bapenda	2	60,000,000	DAU-APBD	Terdiri dari Penyediaan anggaran untuk Pelatihan, Bimtek Dan Diklat Untuk ASN	2	60,000,000
				Bimbingan teknis	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Pelatihan (Orang)	Bapenda	25	190,000,000	DAU-APBD	Terdiri dari Penyediaan anggaran untuk Diklat Teknis & Pelatihan Untuk ASN	25	200,000,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap Tahun Anggaran (Persen)	Bapenda	100	10,000,000	DAU-APBD	Program Pendukung	100	12,000,000
1	20	06	01	Penyusunan Lapoan	Jumlah Dokumen Laporan	Bapenda	3	10,000,000	DAU-	Terdiri dari	3	12,000,000

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiaktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja yang tersusun (Dokumen)				APBD	dokumen pelaporan rutin tahunan dan pertriwulan		
1	20	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran (Persen)	Bapenda	100	95,000,000	DAU-APBD	Program Pendukung	100	100,000,000
1	20	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang tersusun (Dokumen)	Bapenda	5	55,000,000	DAU-APBD	Merupakan Dokumen perencanaan kinerja dan anggaran rutin tahunan	6	55,000,000
1	20	08	03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran dan Promosi Yang Diikuti (Kegiatan)	Bapenda	1	40,000,000	DAU-APBD	Berupa Pelaksanaan Pameran Pembangunan	1	45,000,000
1	20	17		Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target (Persen)	Bapenda	100	6,054,224,400	DAU-APBD	Program Prioritas	100	6,356,935,620
1	20	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD (Jenis)	Bapenda	3	760,627,000	DAU-APBD	Jenis Kegiatan Berupa Pengawasan, Perluasan & Penggalian Pendapatan Daerah	3	792,627,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiaktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	20	17	70	Pengelolaan PBB-P2	Jumlah Pelayanan Kepada Wajib Pajak (Layanan)	Bapenda	6	560,225,000	DAU- APBD	6 Jenis Pelayanan Kepada wajib Pajak	6	590,225,000
1	20	17	71	Penagihan Retribusi Daerah & Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Jenis)	27 Kecamatan Se Kab. Bone	8 Jenis Penagihan	150,732,400	DAU- APBD	Pelaksanaan 8 Jenis Pajak Daerah	8 Jenis Penagihan	176,000,000
1	20	17	72	Pemutakhiran Data Objek PBB-P2	Jumlah Pemutakhiran Data PBB-P2 (Paket)	Kec. Amali, Kec.Awangpone, Kec.Bontocani, Kec. Cenrana, Kec. Cina, Kec.Kahu, Kec. Palakka, Kec. Tellu Siattinge	2	856,000,000	DAU- APBD	Melaksanakan pemutakhiran data objek PBB-P2	2	880,000,000
1	20	17	73	Pendaftaran & Pendataan Wajib Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Daerah & Retribusi Daerah Yang dikelola pendataanya secara berkala (WP & WR)	Bapenda	800	130,315,000	DAU- APBD	Melaksanakan pendataan terhadap wajib pajak daerah	850	160,315,000
1	20	17	74	Penerbitan & Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penerbitan dan distribusi ketetapan pajak daerah & retribusi daerah (Dokumen)	Bapenda	5	150,657,000	DAU- APBD	Berupa penerbitan dokumen surat ketetapan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	5	170,941,780

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiaktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	20	17	75	Operasional Penagihan PBB-P2	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Pemungutan bagi kolektor dan kepala desa selaku pelaksana penagihan PBB-P2 (Kali)	Bapenda	504	2,079,609,000	DAU-APBD	Berupa pembayaran jasa administrasi pemungutan PBB-P2	504	2,120,090,000
1	20	17	76	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan PBB-P2	Jumlah Dokumen Penerimaan PBB-P2 (Dokumen)	Bapenda	4	155,000,000	DAU-APBD	Terdiri dari pembukuan penerimaan PBB-P2	4	163,000,000
1	20	17	77	Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah (Dokumen)	Bapenda	6	124,000,000	DAU-APBD	Melaksanakan pembukuan terkait penerimaan pajak daerah, retribusi daerah & pendapatan daerah lainnya	6	144,677,840
1	20	17	78	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga	Jumlah dokumen laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga (Dokumen)	Bapenda	10	576,928,000	DAU-APBD	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah	10	573,928,000
1	20	17	80	Penerbitan & Distribusi Dokumen Ketetapan PBB-P2	Jumlah Dokumen Penerbitan & Distribusi SPPT, STTS dan DHKP (Dokumen)	Bapenda	3	340,000,000	DAU-APBD	Pelaksanaan cetak massal dokumen SPPT, STTS dan DHKP	3	390,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiaktif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	20	17	84	Pengawasan Penerimaan Retribusi Pasar	Jumlah Pasar Yang Dioptimalkan Pemungutan Retribusinya (Pasar)	Bapenda	83	170,131,000	DAU- APBD	Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Pasar	83	195,131,000
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Kenaikan Objek Pajak Daerah Setiap Tahun (Persen)	Bapenda	100	201,054,000	DAU- APBD	Program Prioritas	100	211,106,700
1	20	26	08	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Orang)	Bapenda	150	201,054,000	DAU- APBD	Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah & Retribusi Daerah	150	211,106,700

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 di Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dengan dirumuskannya Rencana kerja Tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang melalui upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh Stakeholder terkait dalam mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan dalam bagi seluruh pemangku kepentingan , sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bone Tahun 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

SKPD : 12011 - BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1				URUSAN WAJIB				8.462.985.400,00				8.862.110.320,00
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				8.462.985.400,00				8.862.110.320,00
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				908.568.000,00				937.068.000,00
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon dan Listrik Yang Terbayar	Kantor Badan Pendapatan Daerah	12 Rekening	55.000.000,00	DAU		12 Rekening	60.000.000,00
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Pendukung Yang Mendapatkan Pembayaran Jasa Administrasi dan asuransi	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	56 Orang	362.568.000,00	DAU		56 Orang	362.568.000,00
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	16 Jenis	9.000.000,00	DAU		17 Jenis	9.500.000,00
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media Yang Menyediakan Bahan Bacaan	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	35 Media	42.000.000,00	DAU		38 Media	45.000.000,00
1	20	01	23	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Diikuti	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	132 Kegiatan	200.000.000,00	DAU		135 Kegiatan	210.000.000,00
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penunjang Pelaksanaan administrasi perkantoran	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	12 Paket	240.000.000,00	DAU		12 Paket	250.000.000,00
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				869.200.000,00				910.000.000,00
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	1 Unit	430.000.000,00	DAU		1 Unit	430.000.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	5 jenis	38.700.000,00	DAU		6 jenis	40.000.000,00
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	4 jenis	47.500.000,00	DAU		4 jenis	70.000.000,00
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	30 Unit	28.000.000,00	DAU		32 Unit	35.000.000,00
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	1 unit	150.000.000,00	DAU		1 unit	150.000.000,00
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin selama satu tahun anggaran	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	40 Unit	150.000.000,00	DAU		43 Unit	160.000.000,00
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kantor Badan Pendapatan daerah Kab. Bone	50 unit	25.000.000,00	DAU		50 unit	25.000.000,00
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				75.000.000,00				75.000.000,00
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	150 Pasang	75.000.000,00	DAU		150 Pasang	75.000.000,00
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				250.000.000,00				260.000.000,00
1	20	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Formal	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	2 Orang	60.000.000,00	DAU		2 Orang	60.000.000,00
1	20	05	19	Bimbingan Teknis	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	25 Orang	190.000.000,00	DAU		26 Orang	200.000.000,00
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				9.944.000,00				12.000.000,00
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	3 Dokumen	9.944.000,00	DAU		3 Dokumen	12.000.000,00
1	20	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum				94.995.000,00				100.000.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	6 Dokumen	54.995.000,00	DAU		5 Dokumen	55.000.000,00
1	20	08	03	Promosi dan pameran pembangunan	Jumlah Pameran dan promosi pembangunan yang diikuti	Wilayah Kabupaten Bone	1 Kegiatan	40.000.000,00	DAU		1 Kegiatan	45.000.000,00
1	20	17		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.054.224.400,00				6.356.935.620,00
1	20	17	19	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi & Ekstensifikasi PAD	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	3 Jenis	760.627.000,00	DAU		3 Jenis	792.627.000,00
1	20	17	70	Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah pelayanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak	Kantor Badan Pendapatan daerah Kab. Bone	6 Layanan	560.225.000,00	DAU		6 Layanan	590.225.000,00
1	20	17	71	Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Kegiatan Penagihan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	27 Kecamatan Se Kabupaten Bone	8 Jenis	150.732.400,00	DAU		8 Jenis	176.000.000,00
1	20	17	72	Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data PBB-P2	Desa Benteng Tellue (Kecamatan Amali)	2 Paket	856.000.000,00	DAU		2 Paket	880.000.000,00
						Desa Bulusirua (Kecamatan Bonto Cani)						
						Desa Labotto (Kecamatan Cenrana)						
						Desa Lanca						
						Desa Lappae						
						Desa Lattekko (Kecamatan Awangpone)						
						Desa Mallari (Kecamatan Awangpone)						
						Desa Mico (Kecamatan Palakka)						
						Desa Tompong Patu (Kecamatan Kahu)						

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Desa Waempubbu (Kecamatan Amali)						
							Desa Waemputangnge						
							Desa Walenreng						
							Desa Wellulang (Kecamatan Amali)						
							Kelurahan Tanete						
1	20	17	73		Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah & Retribusi Daerah Yang Dikelola Pendataannya Secara Berkala	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	800 WP & WR	130.315.000,00	DAU		850 WP & WR	160.315.000,00
1	20	17	74		Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penerbitan dan distribusi dokumen ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	5 Dokumen	150.657.000,00	DAU		5 Dokumen	170.941.780,00
1	20	17	75		Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Penerima Jasa administrasi pemungutan bagi kolektor dan kepala desa selaku pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	504 Orang	2.079.609.000,00	DAU		504 Orang	2.120.090.000,00
1	20	17	76		Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah dokumen Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	4 Dokumen	155.000.000,00	DAU		4 Dokumen	163.000.000,00
1	20	17	77		Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	6 Dokumen	124.000.000,00	APBD		6 Dokumen	144.677.840,00
1	20	17	78		Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga	Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan Daerah dan Laporan Pendapatan Benda Berharga	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	10 Dokumen	576.928.000,00	DAU		10 Dokumen	573.928.000,00
1	20	17	80		Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Dokumen Penerbitan dan Distribusi SPPT, STTS dan DHKP	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	3 Dokumen	340.000.000,00	DAU		3 Dokumen	390.000.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	17	84	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Jumlah Pasar Yang Dioptimalkan Pemungutan Retribusinya	27 Kecamatan Sekabupaten Bone	83 Pasar	170.131.000,00	DAU		83 Pasar	195.131.000,00
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				201.054.000,00				211.106.700,00
1	20	26	08	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Wilayah Kabupaten Bone	150 Orang	201.054.000,00	DAU		150 Orang	211.106.700,00

Watampone,31 Juli 2019
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE DI WATAMPONE

A. HERMAN,SH, MH
NIP : 19620724 199003 1 008